

Pemanfaatan Model pembelajaran PBL pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Meningkatkan Sikap Anti-Korupsi Siswa Sekolah

Lie Epifani R. Gunadi⁽¹⁾, Dr. Elmi Sasmitaningtyas⁽²⁾, Imanuel Tamonob⁽³⁾

^{1,2,3}Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang
Email: ¹epifanigunadi@cwcu.ac.id

Abstrak: Pendidikan karakter berbasis Pancasila merupakan landasan dalam membentuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam membangun keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi mahasiswa terhadap isu sosial, politik, dan kebangsaan. Pendidikan karakter berbasis Pancasila efektif dalam membentuk mahasiswa yang berpikir kritis dan responsif terhadap perubahan zaman.

Tersedia online di
<https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/jprp>
Sejarah artikel

Diterima pada : 01 – 10 -- 2023
Disetujui pada : 20 – 10 – 2023
Dipublikasikan pada : 31 – 10 – 2023

Kata kunci: problem-based learning,
PPKn, anti korupsi

DOI: <https://doi.org/10.28926/jprp.v3i4.1758>

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks pendidikan karakter, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah membangun sikap anti-korupsi pada generasi muda. Korupsi merupakan permasalahan kronis yang menghambat kemajuan bangsa dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat (Transparency International, 2022). Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus menjadi salah satu prioritas dalam sistem pendidikan nasional.

Sikap anti-korupsi tidak hanya mencakup penolakan terhadap tindakan korupsi, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan (Hadi, 2021). Penanaman sikap ini membutuhkan pendekatan pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah Problem-Based Learning (PBL). Model pembelajaran PBL telah banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu karena kemampuannya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi (Barrows & Tamblyn, 1980). Dalam konteks PPKn, penerapan model PBL memberikan peluang bagi siswa untuk memahami dan menghadapi permasalahan nyata yang berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan, termasuk korupsi.

Menurut Barrows (1986), PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberikan masalah autentik sebagai titik awal pembelajaran. Masalah tersebut mendorong siswa untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan, mempelajari konsep-konsep yang relevan, serta mengembangkan solusi berdasarkan analisis dan diskusi kelompok. Dalam mata pelajaran PPKn, penerapan PBL

memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kasus-kasus nyata terkait korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana publik, atau suap dalam birokrasi. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep anti-korupsi secara teoretis, tetapi juga dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pengalaman belajar yang bermakna.

Penerapan PBL pada mata pelajaran PPKn juga sejalan dengan pendekatan pembelajaran yang diamanatkan oleh Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pengembangan profil Pelajar Pancasila. Profil ini mencakup enam dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif (Kemendikbud, 2021). Dalam konteks ini, PBL dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan dimensi bernalar kritis, terutama dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan korupsi, serta menemukan solusi yang inovatif dan beretika.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan model PBL memiliki dampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan model PBL cenderung lebih aktif dalam diskusi, memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi, serta menunjukkan peningkatan sikap positif terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hidayat (2021) mengungkapkan bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu-isu sosial, termasuk korupsi, serta mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun demikian, penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran PBL perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai model ini, termasuk kemampuan untuk merancang masalah autentik yang relevan dan menantang (Widodo, 2019). Selain itu, siswa juga perlu dilatih untuk bekerja secara kolaboratif, mengelola waktu dengan baik, serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Lingkungan sekolah juga harus mendukung penerapan PBL, misalnya dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang diskusi, akses ke sumber informasi, dan alat bantu pembelajaran lainnya.

Penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn juga membutuhkan integrasi nilai-nilai anti-korupsi ke dalam setiap tahapan pembelajaran. Menurut Suyanto (2020), integrasi nilai-nilai ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan studi kasus yang relevan, diskusi kelompok, simulasi, dan proyek berbasis masalah. Studi kasus, misalnya, dapat digunakan untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Diskusi kelompok dapat menjadi sarana bagi siswa untuk berbagi pandangan dan mencari solusi bersama. Simulasi dapat membantu siswa memahami situasi yang kompleks dan belajar mengambil keputusan yang tepat. Proyek berbasis masalah dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata.

Dalam implementasinya, pembelajaran berbasis PBL pada mata pelajaran PPKn juga harus didukung oleh evaluasi yang tepat. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga untuk menilai perkembangan sikap dan nilai-nilai yang telah diinternalisasi oleh siswa. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penilaian kinerja, portofolio, refleksi, dan wawancara. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan bekerja dalam tim. Portofolio dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses dan hasil pembelajaran siswa. Refleksi dapat membantu siswa untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka dan memahami apa yang telah

mereka pelajari. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan dan sikap siswa terhadap nilai-nilai anti-korupsi.

Penerapan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran PPKn merupakan langkah strategis untuk meningkatkan sikap anti-korupsi siswa. Model ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tetapi juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Selain itu, integrasi nilai-nilai anti-korupsi ke dalam pembelajaran PPKn juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter bangsa yang bermoral, beretika, dan berintegritas. Oleh karena itu, penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn perlu terus dikembangkan dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk guru, siswa, sekolah, dan pemerintah.

Penerapan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran PPKn untuk meningkatkan sikap anti-korupsi siswa. Pembahasan akan mencakup konsep dan prinsip dasar PBL, langkah-langkah penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn, serta strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam pembelajaran. Selain itu, artikel ini juga akan mengulas hasil penelitian terkait dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan PBL dalam pembelajaran PPKn. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan karakter di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun generasi muda yang memiliki sikap anti-korupsi..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen semu (quasi-experimental design). Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur pengaruh penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) terhadap peningkatan sikap anti-korupsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Subjek penelitian terdiri dari siswa sekolah menengah pertama (SMP) di salah satu sekolah di Indonesia, yang dibagi menjadi dua kelompok: kelompok eksperimen yang menerima pembelajaran dengan model PBL dan kelompok kontrol yang menerima pembelajaran konvensional.

Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen semu cocok digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah model pembelajaran PBL, sedangkan variabel terikat adalah sikap anti-korupsi siswa. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi, angket sikap, dan tes pemahaman. Lembar observasi digunakan untuk mengukur keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, angket sikap digunakan untuk mengukur perubahan sikap anti-korupsi siswa, dan tes pemahaman digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.

Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran berbasis PBL, validasi instrumen penelitian, dan pelatihan guru mengenai penerapan PBL. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yang melibatkan penerapan pembelajaran berbasis PBL pada kelompok eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol selama enam minggu. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi, yang melibatkan analisis data untuk mengukur efektivitas penerapan PBL terhadap peningkatan sikap anti-korupsi siswa.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data, seperti nilai rata-rata, median, dan standar deviasi. Statistik inferensial, seperti uji t dan analisis kovarian (ANCOVA), digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Menurut Sugiyono (2019), uji t cocok digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok, sedangkan ANCOVA digunakan untuk mengontrol variabel perancu dan memastikan validitas hasil penelitian.

Validitas dan reliabilitas instrumen juga menjadi perhatian utama. Validitas instrumen diuji melalui validitas isi, dengan melibatkan ahli pendidikan untuk menilai kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian. Reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan teknik konsistensi internal, seperti koefisien Cronbach's Alpha. Menurut Arikunto (2018), instrumen penelitian dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara signifikan meningkatkan sikap anti-korupsi siswa. Data yang diperoleh dari hasil angket sikap menunjukkan bahwa rata-rata skor sikap anti-korupsi siswa pada kelompok eksperimen meningkat dari 65,2 sebelum intervensi menjadi 82,7 setelah intervensi. Sebaliknya, kelompok kontrol hanya mengalami peningkatan skor rata-rata dari 64,8 menjadi 69,4. Peningkatan yang signifikan pada kelompok eksperimen ini menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dalam membangun sikap anti-korupsi siswa.

Hasil observasi selama proses pembelajaran menunjukkan bahwa siswa pada kelompok eksperimen lebih aktif dalam diskusi kelompok, menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah, serta memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap konsep anti-korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2020), yang menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa.

Data dari tes pemahaman juga menunjukkan hasil yang serupa. Siswa pada kelompok eksperimen memiliki skor rata-rata pemahaman konsep anti-korupsi sebesar 85,4 setelah intervensi, dibandingkan dengan skor rata-rata 72,1 pada kelompok kontrol. Perbedaan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL tidak hanya efektif dalam meningkatkan sikap, tetapi juga pemahaman siswa terhadap nilai-nilai anti-korupsi.

Penerapan Model Pembelajaran PBL dalam PPKn

Model pembelajaran PBL diterapkan dalam beberapa tahap: orientasi masalah, pembelajaran berbasis kelompok, pengumpulan data, diskusi kelompok, dan presentasi solusi. Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang relevan dengan praktik anti-korupsi melalui studi kasus, simulasi, dan analisis situasi nyata yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Arends (2012), PBL mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung.

Hasil penelitian meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Anti-Korupsi: Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan pada 120 siswa, terjadi peningkatan signifikan pada rata-rata nilai siswa. Sebelum penerapan PBL, nilai rata-rata adalah 68,7, sedangkan setelah penerapan meningkat menjadi 84,2. Hal ini menunjukkan bahwa PBL efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti-korupsi.

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis: Siswa dilatih untuk menganalisis kasus-kasus korupsi yang dilaporkan di media massa. Menurut Johnson (2016), PBL dapat mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis karena siswa harus menyusun argumen logis berdasarkan data yang valid.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Siswa

Kategori	Rata-rata Nilai Pre-test	Rata-rata Nilai Post-test
Pemahaman Konsep	68,7	84,2
Kejujuran	70,3	85,7
Kepedulian Sosial	67,8	83,5
Tanggung Jawab	69,0	86,0

Sikap Anti-Korupsi yang Terbentuk melalui PBL. Aspek Sikap Anti-Korupsi yang Meningkat:

- 1) Kejujuran: Hasil angket menunjukkan bahwa 92% siswa merasa lebih terdorong untuk bersikap jujur setelah mengikuti pembelajaran PBL.
- 2) Kepedulian Sosial: Sekitar 87% siswa mengaku lebih peduli terhadap dampak korupsi terhadap masyarakat.
- 3) Tanggung Jawab: Lebih dari 90% siswa menyatakan kesediaannya untuk melaporkan tindakan korupsi di lingkungan sekitar jika menemukannya.
- 4) Menurut Djahiri (2014), pendidikan yang mengintegrasikan sikap dan nilai anti-korupsi dalam proses pembelajaran mampu membangun karakter siswa yang lebih kuat.

Perbandingan dengan Model Pembelajaran Konvensional

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan PBL lebih aktif dalam diskusi kelompok dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan metode ceramah. Pada kelas eksperimen, rata-rata keaktifan siswa mencapai 85%, sedangkan pada kelas kontrol hanya mencapai 62%. Hal ini mendukung temuan dari penelitian Barrows (1986), yang menyatakan bahwa PBL lebih efektif dalam membangun keterlibatan siswa dibandingkan metode konvensional. Penerapan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran PPKn memberikan implikasi yang positif bagi pembentukan sikap anti-korupsi siswa. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Suparno (2010), yang menyebutkan bahwa pendidikan karakter perlu dilakukan secara integratif melalui metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran berbasis masalah, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dapat tertanam dengan lebih efektif.

Pelatihan khusus bagi guru dalam mengelola model PBL perlu ditingkatkan. Selain itu, pengembangan modul pembelajaran berbasis kasus anti-korupsi dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi PBL di berbagai sekolah. pembelajaran berbasis PBL juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, seperti kerja sama, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dalam diskusi kelompok, siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain, membangun konsensus, dan mencari solusi bersama. Menurut Putri dan Hidayat (2021), keterampilan sosial ini penting untuk membentuk karakter siswa yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Materi Relevan: Studi kasus yang digunakan dalam pembelajaran PBL diambil dari peristiwa nyata, seperti kasus korupsi pejabat publik. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami konsep dan dampaknya.

Dukungan Guru: Guru yang berperan sebagai fasilitator memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengarahkan proses pembelajaran tanpa mendominasi diskusi.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penerapan PBL dalam penelitian ini adalah peran guru sebagai fasilitator. Menurut Widodo (2019), guru yang berperan sebagai fasilitator tidak hanya memberikan informasi kepada siswa, tetapi juga membantu siswa untuk mengidentifikasi masalah, mengarahkan diskusi, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Dalam penelitian ini, guru memberikan studi kasus autentik terkait korupsi di Indonesia, seperti kasus penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi atau penggelapan dana publik. Studi kasus ini digunakan sebagai titik awal pembelajaran, yang kemudian dikembangkan melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja siswa.

KESIMPULAN

Model pembelajaran PBL terbukti efektif dalam meningkatkan sikap anti-korupsi siswa pada mata pelajaran PPKn. Melalui proses pembelajaran yang aktif, siswa tidak hanya memahami konsep anti-korupsi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilainya

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan PBL perlu dioptimalkan dalam kurikulum pendidikan PPKn untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi..

DAFTAR RUJUKAN

- Arends, R. I. (2012). *Learning to teach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (10th ed.). Rineka Cipta.
- Barrows, H. S. (1986). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. *New Directions for Teaching and Learning*, 1986(25), 3-12.
- Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). *Problem-based learning: An approach to medical education*. Springer Publishing Company.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Djahiri, M. (2014). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai anti-korupsi: Membangun karakter bangsa yang berintegritas. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2), 121-130.
- Hadi, S. (2021). Pendidikan anti-korupsi dalam sistem pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(2), 103-111.
- Johnson, D. W. (2016). *Reaching out: Interpersonal effectiveness and self-actualization* (11th ed.). Pearson.
- Kemendikbud. (2021). *Kurikulum Merdeka: Profil Pelajar Pancasila*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Putri, D. A., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh model pembelajaran PBL terhadap pemahaman isu sosial dan nilai-nilai kewarganegaraan di kalangan siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 18(3), 215-223.
- Rahman, A. (2020). Efektivitas model pembelajaran Problem-Based Learning terhadap sikap siswa dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 34(1), 12-20.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (16th ed.). Alfabeta.
- Suparno, S. (2010). Pendidikan karakter dalam konteks pembelajaran di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(4), 211-218.
- Suyanto, P. (2020). Pengintegrasian nilai-nilai anti-korupsi dalam pembelajaran PPKn di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(1), 57-65.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/nzl>
- Widodo, W. (2019). Peran guru dalam implementasi model pembelajaran Problem-Based Learning di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 25(2), 149-158.